



Lamongan
Megilan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO 2023

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KAB. LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagbka@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor : 005 / 41 / 413.034/2024

Lamongan, 6 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko Tahun 2023 Bagian
Perencanaan dan Keuangan
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

Kab. Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN



TEMBUSAN, disampaikan kepada :




Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagbka@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / 41 / 413.034 / 2024
TANGGAL TERBIT	:	6 April 2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Pelaporan  EKA DIANITA W.N, SE, MM. Penata Tingkat . I NIP. 19840306 201101 2 014
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Bagian Perencanaan Dan Keuangan  UJI BASUKI, SE.MM Pembina NIP. 196911171994021001
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah  NANIK PURWATI, SE, MM. Penata Tingkat I NIP. 19731208 200312 2 004

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Perencanaan dan Keuangan mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Perencanaan dan Keuangan demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan, selain itu Bagian Perencanaan dan Keuangan juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyusun penilaian resiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 untuk mempercepat implementasi monitoring dan evaluasi SPIP di Lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan pada khususnya dan Lingkup Sekretariat Daerah pada umumnya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;

- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kousioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Perencanaan dan Keuangan bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Perencanaan dan Keuangan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian, Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Perencanaan dan euangan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III.PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam bidang perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah, penetapan ini berdasarkan tusi yang diemban Bagian Perencanaan dan Keuangan yang bergerak didalam urusan KeSekertariatan Daerah.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

Tabel B.1 Indentifikasi Risiko
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlampir

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

Tabel C.1 Analisis Risiko
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlampir

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal
- d. Melaksanakan desk atau asistensi terkait perencanaan dan keuangan demi meminimalisir kesalahan.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah:							
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	tatap muka langsung, zoom atau mengikuti pembinaan terkait peningkatan SDM atau FGD	BKPSDM, BAPPELITBANGDA ,BPKAD,Lembaga/kementrian	SDM Penatausahaan Keuangan dan Penyusun Program Lingkup Setda	Oktober - Desember	Belum terealisasi	0 % resiko

Risiko Operasional OPD Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah:							
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	tatap muka langsung, zoom atau mengikuti pembinaan terkait peningkatan SDM atau FGD	BKPSDM, BPKAD .Lembaga/kementrian	SDM Penyusun Program Lingkup Setda	Oktober - Desember	Belum terealisasi	0 % resiko
2	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	tatap muka langsung, zoom atau mengikuti pembinaan terkait peningkatan SDM atau FGD	BKPSDM, BAPPELITBANGDA ,Lembaga/kementrian	SDM Penatausahaan Keuangan	Oktober - Desember	Belum terealisasi	0 % resiko

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM penyusun program dan SDM penatausahaan keuangan dan diupayakan ikut serta	Kabag Perencanaan dan Keuangan	juli - desember	juli - desember	sisa resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Penyusun Program, dan diupayakan ikut serta	Kabag Perencanaan dan Keuangan	juli - desember	juli - desember	sisa resiko 0%
2	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Penatausahaan Keuangan, dan diupayakan ikut serta	Kabag Perencanaan dan Keuangan	juli - desember	juli - desember	sisa resiko 0%

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada tahun 2023 , dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar

menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Perencanaan dan Keuangan mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Perencanaan dan Keuangan demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan, selain itu Bagian Perencanaan dan Keuangan juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyusun penilaian resiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 untuk mempercepat implementasi monitoring dan evaluasi SPIP di Lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan pada khususnya dan Lingkup Sekretariat Daerah pada umumnya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;

- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kousioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Perencanaan dan Keuangan bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Perencanaan dan Keuangan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian, Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Perencanaan dan euangan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III.PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam bidang perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah, penetapan ini berdasarkan tusi yang diemban Bagian Perencanaan dan Keuangan yang bergerak didalam urusan KeSekertariatan Daerah.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

Tabel B.1 Indentifikasi Risiko
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlampir

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

Tabel C.1 Analisis Risiko
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlampir

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal
- d. Melaksanakan desk atau asistensi terkait perencanaan dan keuangan demi meminimalisir kesalahan.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah:							
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	tatap muka langsung, zoom atau mengikuti pembinaan terkait peningkatan SDM atau FGD	BKPSDM, BAPPELITBANGDA ,BPKAD,Lembaga/kementrian	SDM Penatausahaan Keuangan dan Penyusun Program Lingkup Setda	Oktober - Desember	Belum terealisasi	0 % resiko

Risiko Operasional OPD Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah:							
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	tatap muka langsung, zoom atau mengikuti pembinaan terkait peningkatan SDM atau FGD	BKPSDM, BPKAD .Lembaga/kementrian	SDM Penyusun Program Lingkup Setda	Oktober - Desember	Belum terealisasi	0 % resiko
2	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	tatap muka langsung, zoom atau mengikuti pembinaan terkait peningkatan SDM atau FGD	BKPSDM, BAPPELITBANGDA ,Lembaga/kementrian	SDM Penatausahaan Keuangan	Oktober - Desember	Belum terealisasi	0 % resiko

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM penyusun program dan SDM penatausahaan keuangan dan diupayakan ikut serta	Kabag Perencanaan dan Keuangan	juli - desember	juli - desember	sisa resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Penyusun Program, dan diupayakan ikut serta	Kabag Perencanaan dan Keuangan	juli - desember	juli - desember	sisa resiko 0%
2	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Penatausahaan Keuangan, dan diupayakan ikut serta	Kabag Perencanaan dan Keuangan	juli - desember	juli - desember	sisa resiko 0%

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada tahun 2023 , dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar

menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.